



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

INSPEKTORAT

Jalan RA. Basoeni Nomor 19 C Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61361

Telp. (0321) 329188 – 321959 Fax. (0321) 329188

Website : www.inspektorat.mojokertokab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

Nomor : 705/2367/416-060/2022

Tanggal : 06 September 2022

Lampiran : -

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Tim telah melakukan Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dan diperoleh Nilai AKIP **82,99** dengan Predikat **A (Memuaskan)**.
 2. Tujuan dilaksanakannya evaluasi akuntabilitas internal adalah :
 - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
 3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (Empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

4. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.
4.	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.
5.	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
			manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

5. Pencapaian predikat A (Memuaskan), merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	27,25
b. Pengukuran Kinerja	30,00	24,14
c. Pelaporan Kinerja	15,00	13,50
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,10
Jumlah	100,00	82,99

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1) Sub Komponen Keberadaan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto telah memiliki dokumen perencanaan kinerja yang meliputi Renstra dan Renja, dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja yang meliputi Rencana Aksi Bulanan atau Triwulan dan dokumen PK dan SKP semua pegawai, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja meliputi

RKA/DPA yang didukung dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sub kegiatan.

2) Sub Komponen Kualitas

Dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto telah memuat indikator keberhasilan yang memenuhi kriteria IK yang baik/SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound*) sesuai jenjang. Semua indikator di level RPJMD (indikator Program) sudah berorientasi outcome/hasil. Sasaran yang berorientasi hasil, target kinerja yang ditetapkan cukup baik, program/kegiatan/sub kegiatan yang ada merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran. Dokumen Renstra sebagian besar selaras dengan dokumen RPJMD. Perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

3) Sub Komponen Implementasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto menggunakan dokumen Renstra sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto juga telah menetapkan Perjanjian Kinerja pada semua pegawai. Target yang telah ditetapkan pada Renstra dan Renja telah dimonitoring pencapaiannya di akhir tahun, namun belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti. Dokumen Renstra sebagian besar selaras dengan dokumen RPJMD. Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya belum dilakukan secara menyeluruh

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja, serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyempurnaan yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,14** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a) Sub Komponen Keberadaan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto sudah menyusun Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran kinerja dan telah diformalkan, dokumen IKU dan IKI telah menjelaskan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan pengumpulan data kinerja dapat diandalkan. Mekanisme pengumpulan data kinerja telah ditetapkan dengan SOP pengumpulan data kinerja.

b) Sub Komponen Kualitas

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien. Pengumpulan dan pengukuran data kinerja telah dilaksanakan dan Kepala Dinas telah ikut serta dalam pengukuran kinerja. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yaitu SUHITA dan SISAIP. Namun pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala serta belum didokumentasikan secara lengkap dalam laporan berupa hasil kegiatan, penanggungjawab, daftar permasalahan dan rekomendasi.

Pemantauan atas pengukuran kinerja secara berjenjang tidak disertai dengan laporan kinerja tiap jenjang struktural atas capaian kinerja dan dokumentasi evaluasi kinerja per bulan/triwulan. Rapat koordinasi pengendalian kinerja belum dilaksanakan tiap bulan/triwulan.

c) Sub Komponen Implementasi

Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional. Namun belum ada hasil identifikasi pengalihan jabatan ke jabatan fungsional.

Pengukuran kinerja juga telah mempengaruhi penyesuaian organisasi, dan penyesuaian anggaran. Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, dan aktivitas dalam mencapai kinerja. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment. Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum menganalisa

efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja pada triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2022.

Selain itu, belum semua bidang/seksi menyusun laporan kinerja dan belum ada bukti setiap jenjang telah menindaklanjuti rekomendasi dari pemantauan kinerja dari pimpinan, serta pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja karena SKP Tahun 2022 belum dibuat.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

a) Sub Komponen Keberadaan

Laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto telah disusun secara berkala dan berjenjang dan telah dilakukan reviu secara berkala, Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sudah di website MenPan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di website Mendagri.

Hasil reviu dokumen LKjIP Perangkat Daerah oleh internal yaitu reviu atas atas dokumen LKjIP, untuk keberhasilan dan ketidakberhasilan capaian kinerja masing-masing sasaran belum dijelaskan berdasarkan capaian hasil program.

b) Sub Komponen Kualitas

Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja yang berkualitas sesuai dengan standar sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2018, dengan sistematika penyajian antara lain :

- 1) Informasi tentang pencapaian kinerja.
- 2) Perbandingan Realisasi kinerja dengan target tahunan.
- 3) Perbandingan Realisasi kinerja dengan target jangka menengah.

- 4) Perbandingan Realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun tahun sebelumnya.
- 5) perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- 6) Informasi tentang kualitas capaian kinerja dan hambatannya.
- 7) Informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja.
- 8) Informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

Namun, dalam dokumen laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

c) Sub Komponen Implementasi

Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan dan menjadi kepedulian seluruh pegawai. Selain itu informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk menyesuaikan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. Namun belum ada matrik sinkronisasi laporan kinerja dengan PK dan SKP serta rencana aksi dengan hasil laporan kinerja. Sehingga Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. Evaluasi laporan kinerja belum dilaksanakan secara berkala (bulan).

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas pelaksanaan evaluasi kinerja oleh internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mencakup penilaian atas pemenuhan evaluasi kinerja internal, kualitas pelaksanaan, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal tersebut, serta pemenuhan atas rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP tahun 2021. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **18,10** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a) Sub Komponen Keberadaan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto telah memiliki dokumen SOP Penyusunan LKJIP, namun belum maksimal melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang pada seluruh unit kerja. Evaluasi AKIP belum dilaksanakan secara berkala (bulan) dengan membandingkan capaian dan target, lalu menjelaskan hambatan yang dihadapi, rekomendasi oleh pimpinan dan evaluasi atas rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebelumnya.

b) Sub Komponen Kualitas

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten belum dilaksanakan sesuai standar. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan oleh Sumber Daya yang memadai dengan telah mengikuti Bimtek SAKIP, dan adanya SK Tim SAKIP. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi). Evaluasi kinerja internal pada tahun 2022 belum dilakukan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dan belum dilaksanakan secara berkala.

c) Sub Komponen Implementasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat atas LHE SAKIP Tahun 2020, namun untuk tahun 2021 dan 2019 belum didukung dengan tindak lanjut. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja namun belum maksimal. Misalnya perlu ditetapkan inovasi/budaya kerja/pengendalian sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil money triwulan sehingga di akhir tahun target tercapai.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

- a. Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2022 secara berjenjang untuk semua pegawai;
- b. Menyusun strategi pencapaian kinerja tahunan sesuai tindak lanjut hasil pengukuran capaian kinerja yang ada di Renja guna mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengukuran kinerja sampai ke level staf, dan menuangkannya dalam laporan kinerja individu secara berkala;
- d. Menjelaskan keberhasilan dan ketidakberhasilan capaian kinerja masing-masing sasaran guna mengidentifikasi resiko kemungkinan kegagalan pencapaian target kinerja sebagaimana hasil reuiu dokumen LKjIP Perangkat Daerah oleh internal, guna mendorong efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- e. Mendokumentasikan hasil pemantauan dan evaluasi berkala atas capaian kinerja secara berjenjang. Dokumentasi paling sedikit berisi target dan realisasi capaian kinerja, saran/rekomendasi pimpinan secara berjenjang serta tindak lanjut rekomendasi sebelumnya;
- f. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah secara optimal sehingga mampu memberikan perbaikan kinerja di tahun berikutnya, serta meningkatkan peran aktif pimpinan dan atasan masing-masing pegawai untuk mendorong semua pegawai mengoptimalkan implementasi SAKIP sehingga dapat terbentuk persamaan persepsi bahwa SAKIP tidak hanya sebatas pemenuhan dokumen tetapi memerlukan langkah nyata dan kerjasama dari semua level individu untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang lebih akuntabel;
- g. Menyusun laporan evaluasi AKIP internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan standar dan berjenjang serta menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja oleh Inspektorat maupun internal.

Demikian laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

Mengetahui,
INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. POEDJI WIDODO
Pembina Tingkat I
NIP. 19700425 199003 1 006

Tim Evaluator :

1. WASTUTI MURYATI, SP, M.Agr

2. RYAN KURNIAWAN, SE., M.Si

3. ERNY WAHYUNINGSIH P., S.Tp

4. LIA KESUMAWATI, SP

5. NOVI PRASETYARINI, SE

[Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of evaluators]



Balai
Sertifikasi
Elektronik